



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEPASTIAN PASOKAN DAN HARGA GAS

Niken Paramita Purwanto

Analisis Legislatif Ahli Muda
niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ketidakcocokan pasokan dan permintaan gas industri menjadi problem yang belum terselesaikan. Terkait infrastruktur, pipanisasi gas juga perlu dipacu agar lebih banyak lagi menjangkau industri. Salah satu penekanan dalam aturan baru adalah pertimbangan ketersediaan pasokan gas bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara. Sebelumnya, dalam lampiran Kepmen ESDM No. 134/2021, mayoritas industri pengguna dikenai harga USD6 per MMBTU. Dalam aturan baru, harga menjadi lebih tinggi meski ada pula yang tetap. Sebagian besar masih di bawah USD7 per MMBTU. Adapun tujuh bidang industri pengguna yang mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT), sebagaimana sebelumnya diatur dalam Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menurut Praktisi energi gas industri, Achmad Widjaja, di beberapa wilayah sejumlah industri masih tertatih. Pasalnya, masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga fluktuatif dan tidak menikmati HGBT untuk tujuh bidang industri yang ditetapkan pemerintah. Secara umum, kondisi infrastruktur untuk logistik dan kelistrikan sudah baik, tetapi ketersediaan gas bagi industri masih menjadi kendala sehingga energi gas perlu dipacu untuk mendukung industri, karena industri diarahkan dan diwajibkan untuk menggunakan gas (energi dengan emisi rendah). Komitmen pemerintah untuk segera mengatasi masalah infratraktur gas sangat dibutuhkan agar segera terpenuhi kebutuhan gas industri sehingga tercipta kepastian harga dan pasokan gas bagi ketujuh bidang industri.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan bahwa persoalan ini terjadi karena kondisi sumur-sumur migas yang semakin tua. Sejumlah masalah pun muncul terkait, antara lain, air, yang membuat biaya operasi meningkat. "Otomatis, kami juga tak bisa memotong lebih banyak. Kasarannya, dari USD6 itu, USD4-nya untuk (industri) hulu. Namun, sekarang hulunya USD5 (sisanya ditanggung negara). Itu terjadi karena dengan berjalannya waktu, di lapangan (migas), *cost*-nya lebih tinggi," ujar Tutuka. Dengan kondisi tersebut, Kementerian ESDM menjadi sangat berhati-hati terkait penetapan HGBT agar bagian penerimaan negara dikurangi dan tak mengurangi penerimaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar harga masih paling minim dan bisa dijangkau.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, harga gas untuk industri idealnya ditekan serendah mungkin. Untuk meningkatkan daya saing industri, harga gas seharusnya tidak dinaikkan atau setidaknya dipertahankan. Namun, di sisi lain juga melihat ada pertimbangan tertentu dari pemerintah sehingga akhirnya menaikkan HGBT. Misalnya, terkait ketersediaan pasokan dari pemasok gas bumi.

Mengenai pengembangan infrastruktur, pemerintah saat ini tengah membangun proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) tahap I, yakni ruas Semarang-Batang. Menurut data Kementerian ESDM, per 25 Mei 2023, kemajuan proyek itu mencapai 91,35%. Sistem itu

ditargetkan siap menerima gas pada Agustus 2023 dan progres pembangunan pipa gas dari Semarang sampai ke lokasi ini (Batang) tinggal 1,8 km lagi. Masih ada dua titik yang belum tersambung karena harus dibor di bawah fondasi dan di bawah jalan. Pembangunannya ditargetkan akan selesai akhir bulan ini. Gas ini terlebih dahulu akan dipakai oleh PT Rumah Keramik Indonesia.

Atensi DPR

Peran DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri adalah dengan melakukan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah untuk segera mengatasi masalah infratraktur gas agar segera terpenuhi kebutuhan gas industri sehingga tercipta kepastian harga dan pasokan gas bagi bidang industri. Pemerintah diharapkan bisa mengambil jalan tengah dengan kebijakan harga gas hanya diperuntukkan untuk industri strategis yang benar-benar butuh pertolongan dan kinerjanya bagus.

Sumber

Kompas, 22 Juni 2023; dan
kontan.co.id, 21 Juni 2023.

Minggu ke-4 Juni
(19 s.d. 25 Juni 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023